



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SITI HARYANI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEREKONOMIAN
3. NHK : 58395

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.536.214.000

1. Tanah Seluas 765 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 193.162.500
2. Tanah Seluas 290 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 366.125.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2053 m2/290 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.451.471.000
4. Tanah Seluas 1953 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.380.771.000
5. Tanah Seluas 311 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 942.330.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 333.300.000
7. Tanah Seluas 687 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 242.854.500
8. Tanah Seluas 1550 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 626.200.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 178.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X --- Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA --- Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA --- Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



5. MOBIL, TOYOTA ETIOS 1.2E MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI  
Rp. 80.000.000

6. MOBIL, AGYA STANDAR Tahun 2016, HIBAH TANPA AKTA Rp.  
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 269.956.731

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.984.170.731

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.984.170.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.